

INDONESIA DAN DINAMIKA POLITIK TIMUR TENGAH (JANUARI–NOVEMBER 2011)*

Oleh: Riza Sihbudi

Abstract

The current political tension in Arab states have intensified, especially after similar crises that ousted Bin Ali in Tunisia and Hosni Mubarak in Egypt. There are also differences in how nations have responded to each political crisis. The Arab regimes are facing strong resistance from the majority of their own people, with Libya falling into civil war. Many Libyan people are fed up and disgusted with the leadership of Colonel Qadhafi, who has ruled the country for 40 years with desert-style authoritarianism. People in Libya demanded a succession and political reforms that would pave the way for freedom of speech and association, which have eluded the nation for four decades. Then, why did the West take a different political attitude towards the pro-democracy movements in the Arab countries? In the case of Libya, both mass media and political elites drew a line in supporting the resistance movement. The Western forces under NATO even launched military strikes against Libya to support the opposition camp as soon as they managed to convince the United Nations to enforce a no-fly zone in Libyan airspace. The opportunistic attitude of the West in the case of Libya is closely related to economic factors, which is Libyan oil reserves. After successfully controlling Iraq, Libya now seems to be the next easy prey, especially by hawkish groups and neo-conservative that generally control US oil companies. In the case of the NATO's political attitudes toward the Libyan crisis, economic considerations (oil) are more advanced than political reality. Politically, Qadhafi is now clearly different from what he was. Before 2003, Qadhafi was known as an anti-West figure. The US and its allies seem reluctant to learn from history. Their failures in Iraq and Afghanistan are not enough for them to learn. That's the ugly fact of Western hypocrisy.

Pengantar

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan emosional-kultural serta faktor historis. Faktor kedekatan emosional-kultural yang dimaksud adalah, berkaitan dengan mayoritas pemeluk agama di Indonesia maupun di kawasan Timur Tengah, yaitu agama Islam. Dari segi faktor historis, hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah bisa dilacak sejak tahun 1940an, tatkala negara-negara di kawasan ini, khususnya Mesir, Suriah dan Irak, menjadi negara-negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan pergolakan politik di kawasan Timur Tengah dan respon Indonesia terhadap dinamika tersebut.

Sepanjang tahun 2011 ini sekurang-kurangnya ada tiga kejadian politik penting di kawasan ini. Yaitu, pertama, apa yang dikenal sebagai “Musim Semi” Arab; kedua, laporan-laporan sekitar pembunuhan terhadap Pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden; ketiga, tercapainya Rekonsiliasi faksi Hamas dan Al-Fatah di Palestina. Bagaimana Indonesia menyikapi dinamika politik tersebut? Itulah yang akan coba dibahas di sini.

“Musim Semi” Arab

Apa yang disebut sebagai “musim semi” Arab (*the Arab spring*) adalah terjadinya pergolakan di sejumlah negara Arab --bermula dari Tunisia, Mesir dan kemudian merembet ke negara-negara Arab lain, seperti Libya, Bahrain, Yaman, dan Suriah-- yang dipicu oleh aksi bakar diri hingga tewas seorang pemuda pengangguran Tunisia bernama Tarek al-Tayyib Muhammad Bouazizi, pada 17 Desember 2010, yang memicu pergolakan politik hingga berujung pada jatuhnya Presiden Tunisia, Zinal Abidin (Zine al Abidine) bin Ali. Pergolakan di Tunisia

* Tulisan ini sengaja dibatasi periodenya mengingat dinamika politik di kawasan Timur Tengah kadang berlangsung dan berubah dengan cepat, dalam hitungan menit bahkan mungkin detik.

ini kemudian berimbas ke tetangganya, Mesir. Hanya dalam waktu sekitar sebulan kemudian, Presiden Mesir, Hosni Mubarak pun jatuh dari kekuasaannya, setelah demonstrasi bersejarah oleh puluhan (mungkin ratusan) ribu massa yang berkumpul di Lapangan Tahrir (Tahrir Square), Kairo, Januari-Februari 2011.

Runtuhnya dua tirani “boneka Amerika” --khususnya Mubarak di Mesir-- itu sekaligus menandai kekalahan telak strategi geopolitik Washington di kawasan ini dalam 60 tahun terakhir. Sejarah seakan berulang. Tepat 40 tahun sebelumnya, 11 Februari 1979, Gedung Putih juga kehilangan sekutu terpentingnya di kawasan Teluk Parsi, ketika monarki Syah Reza Pahlevi di Iran berhasil diruntuhkan, juga oleh kekuatan politik rakyat yang waktu itu dimotori oleh Imam Khomeini.¹

Kekalahan Amerika di dua negara tersebut, dapat berdampak pada terjadinya perubahan peta politik yang sangat signifikan di kawasan ini. Sejatinya Amerika sudah menderita kekalahan telak sejak invasi mereka ke Afghanistan dan Irak tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan, kecuali tumbanganya rezim Saddam Hussein. Namun, kekuatan politik pro-Saddam belum sepenuhnya berhasil dilumpuhkan. Begitu pula kekuatan Taliban di Afghanistan. Alih-alih mengalahkan dua kekuatan politik tersebut, Amerika justru harus menghadapi kenyataan pahit, dengan hampir setiap hari ada saja serdadu mereka yang tewas di wilayah ini.² Sementara sekutu utama Gedung Putih yang paling dekat, yaitu Israel justru membuat sedikitnya dua kali blunder. Israel bukan hanya gagal melumpuhkan milisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Mereka pun gagal total untuk menjatuhkan pemerintahan Hamas di Jalur Gaza.

Perang Israel vs Hizbullah pada 2006 dan Israel vs Hamas pada 2009, justru menaikkan pamor Hizbullah-Hamas di mata dunia internasional. Sebaliknya, citra Israel justru semakin terpuruk. Apalagi dengan sikap kepala batu rezim PM Israel, Benjamin Netanyahu yang tetap

melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, yang tidak hanya ditentang dunia internasional, melainkan juga oleh pemerintahan Presiden Barack Obama, kecuali didukung sepenuhnya oleh Menlu Hillary Clinton yang memang dikenal memiliki hubungan khusus dengan kalangan petinggi Lobi Israel di Washington yang tergabung dalam AIPAC (the American-Israel Public Affairs Committee).

Kasus kekalahan Zainal Abidin Bin Ali di Tunisia dan yang kemudian disusul oleh kejatuhan Hosni Mubarak di Mesir, semakin memperjelas kemunduran strategi geopolitik Washington di kawasan ini. Pergolakan di dua negara tersebut, khususnya Mesir, juga di Yaman dan Bahrain, sebaiknya bukan hanya dibaca sebagai kemuakan rakyat terhadap penguasa yang sudah terlalu lama memerintah dengan tangan besi, melainkan juga sebagai perlawanan rakyat Arab terhadap arogansi dan dominasi politik kolonial Amerika Serikat dan Israel di Dunia Arab. Mayoritas rakyat Arab, bisa jadi, sangat sulit memahami logika Gedung Putih, yang di satu sisi mendorong Mesir untuk berdamai dengan kaum Zionis Israel, tapi di sisi lain justru mendorong sikap permusuhan warga Arab Mesir terhadap bangsa dan negara Arab lainnya yaitu: Irak dan Palestina di bawah Hamas. Begitu pula provokasi untuk memusuhi bangsa dan negara Afghanistan dan Iran, kendati bukan Arab, tapi sama-sama mayoritas beragama Islam.

Selain itu, Amerika Serikat dan Dunia Barat baru akhir-akhir ini merasakan terlalu mahalanya harga perang di Irak dan Afghanistan. Selain jatuhnya korban manusia yang tidak ternilai, Washington telah menghabiskan tidak kurang dari tiga triliun dolar hanya untuk membiayai perang Irak.³ Inilah salah satu penyebab utama merosotnya perekonomian Amerika Serikat dan juga Eropa, sejak 2008. Hanya saja mereka tampaknya masih malu-malu untuk mengakuinya.

NATO, khususnya Amerika Serikat, (akhir-akhir ini) dihadapkan pada buah simalakama di Irak dan Afghanistan. Di satu sisi, sejatinya mereka sangat ingin secepatnya keluar dari kedua wilayah tersebut. Mereka benar-benar dibuat frustrasi, bagaimana senjata-senjata pemusnah

¹ Lihat juga, Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

² Tentang jumlah korban pasukan AS/Sekutu di Afghanistan dan Irak, lihat, misalnya, “Coalition Military Fatalities by Year”, dalam <http://icasualties.org/oef/>.

³ Lihat juga, Joseph E. Stiglitz & Linda J. Bilmes, *The Three Trillion Dollar War: The True Cost of Iraq Conflict*. (2008).

massal mereka yang ultramodern tidak juga berhasil menundukkan semangat juang tanpa menyerah baik di kalangan kelompok perlawanan di Irak maupun pasukan Taliban di Afghanistan. Tidak heran jika Presiden Obama bersiap-siap keluar dari Irak dan siap-siap berdamai dengan kaum Taliban (yang selama ini dicap sebagai kaum “teroris”).

Sikap Barat

Kelompok Neokonservatif yang tergabung dalam PNAC (Project for New American Century) setelah berhasil mendorong invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak, kemudian mendorong Washington untuk melakukan intervensi ke Libya. Mereka --yang antara lain dimotori oleh para petinggi era George W. Bush seperti Paul Wolfowitz, Elliott Abrams, Marc Thiessen, William Kristol, Robert Kagan, dan Peter Wehner-- membuat petisi yang ditujukan ke Presiden Obama. Libya adalah pintu masuk yang sangat diidamkan kaum *Hawkish* dan *Neocons* di Washington.⁴ Sudah bukan rahasia lagi, jika Pemimpin Libya Muammar Qadhafi, merupakan salah seorang pemimpin yang sangat diktator di Dunia Arab. Diberitakan bahwa kekejaman dan kediktatorannya hanya bisa “ditandingi” oleh mendiang Saddam Hussein dan Hafiz al-Asad ketika masih hidup dan berkuasa. Sekalipun demikian, kekejaman Qadhafi (bersama Saddam dan Hafiz) barangkali tidak bisa “mengalahkan” kekejaman dan kebiadaban rezim Israel terhadap rakyat Palestina atau kekejaman dan kebiadaban para serdadu Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Barangkali tidak seorangpun yang menolak untuk menghentikan kekejaman Qadhafi --yang tewas di tangan NATO pada pertengahan Oktober 2011-- terhadap rakyat Libya. Namun, pada saat bersamaan, harus dihentikan pula kekejaman rezim Israel terhadap warga Palestina dan kekejaman Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak.

Setelah melanda Tunisia dan Mesir pergolakan politik serupa melanda kawasan lain

⁴ Definisi “Hawkish” menurut kamus Oxford adalah: (i). *resembling a hawk in nature or appearance*; (ii). *advocating an aggressive or warlike policy, especially in foreign affairs: the administration's hawkish stance*. Lihat, misalnya, <http://oxford-dictionaries.com/definition/hawkish>.

di Timur Tengah, khususnya Bahrain, Libya, Yaman, dan Suriah. Pergolakan di Libya dan Bahrain ini tampak semakin “panas”, terutama setelah pergolakan serupa berhasil menjatuhkan kekuasaan Bin Ali di Tunisia dan kemudian Hosni Mubarak di Mesir. Pada saat yang bersamaan, menarik untuk memperhatikan bagaimana sikap media massa dan para elite politik negara-negara Barat terhadap krisis di Libya dan Bahrain (juga Suriah dan Yaman). Ada persamaan sekaligus perbedaan di antara kedua negara Arab yang tengah bergolak itu. Persamaannya adalah kedua rezim tengah menghadapi perlawanan yang cukup keras dari mayoritas rakyat sendiri. Banyak rakyat Libya yang mulai jenuh dan muak dengan gaya kepemimpinan Kolonel Muammar Qadhafi yang telah memerintah Libya sejak 1971 dengan gaya otoritarianisme. Di Yaman-pun demikian.

Mereka menuntut agar segera ada suksesi dan reformasi politik guna memberikan peluang bagi kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang selama 40 tahun dibungkam. Berbeda dengan Libya yang menganut sistem semi-republik, Kerajaan Bahrain (*Kingdom of Bahrain*) sepenuhnya menganut monarki absolut. Bahrain termasuk unik. Kendati sekitar 70% warganya menganut Islam mazhab Syiah, negara ini sepenuhnya dikuasai raja-raja bermazhab Sunni. Bahkan keluarga Dinasti Khalifah yang masih berkuasa sudah bertahta sejak 1783. Berbeda dengan di Suriah di mana mayoritas warganya menganut Islam mazhab Sunni tapi dikuasai oleh elite politik berlatar belakang Syiah Alawiyah.⁵

Namun, dibandingkan Libya, Bahrain sebenarnya relatif “lebih demokratis” dalam arti mempunyai parlemen dan partai politik pun diberi hak hidup di negeri ini kendati sepenuhnya di bawah kendali rezim Khalifah. Pertanyaannya, mengapa Barat mengambil sikap berlainan terhadap gerakan prodemokrasi di dua negara tersebut? Juga terhadap Yaman dan Suriah. Dalam kasus Libya, baik media massa maupun elite politik Barat sangat gamblang mendukung gerakan perlawanan, juga mengambil posisi yang

⁵ Lihat, misalnya, Vali Nasr, *Kebangkitan Syiah: Islam, Konflik dan Masa Depan*, terjemahan, (Jakarta: Diwan, 2007), hlm. 102-103

jelas-jelas anti-Qadhafi. Sikap ini sama dengan sikap mereka terhadap Suriah.

Mereka bahkan sudah melancarkan intervensi militer. Sebelumnya, mereka berhasil mendikte PBB untuk memberlakukan zona larangan terbang (*no-fly zone*) di udara Libya. Langkah ini kemudian akan diikuti dengan mempersenjatai kelompok-kelompok anti-Qadhafi di dalam negeri Libya. Ada dua fenomena yang menarik. Pertama, para pemimpin Barat yang menganggap Al-Qaeda sebagai “musuh utama” dalam 10 tahun terakhir belakangan (Barat dan Al-Qaeda) justru berangkuhan untuk satu tujuan yang sama, yaitu menumbangkan Qadhafi, yang dibunuh oleh NATO dan sekutunya pada Oktober 2011. Kedua, ketika ada indikasi kelompok anti-Qadhafi akan menderita kekalahan, Sekjen PBB buru-buru menyerukan diberlakukannya gencatan senjata. Sikap oportunis Barat, khususnya Washington, dalam kasus Libya tentu berkaitan erat dengan faktor ekonomi, yaitu kandungan minyak di Libya. Setelah Irak berhasil dikuasai dan Iran belum berhasil dikalahkan, Libya menjadi sasaran berikutnya, terutama oleh kelompok *Hawkish* dan neokonservatif yang umumnya mengendalikan perusahaan-perusahaan minyak di Amerika Serikat.

Dalam kasus sikap Barat terhadap krisis Libya, pertimbangan faktor ekonomi (minyak) ternyata lebih dikedepankan ketimbang realitas politik. Secara politis, Qadhafi era tahun 2011 jelas berbeda dengan dulu. Sebelum 2003, Qadhafi dikenal sebagai sosok anti-Barat. Bersama Imam Khomeini (Iran), Hafiz al-Asad (Suriah), dan Saddam Hussein (Irak), mereka seringkali disebut sebagai para pemuka Timur Tengah “penganut garis keras” dan “anti-Barat” karena termasuk “barisan” penentang politik Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah.

Namun, sejak 2003, Qadhafi mengubah haluan politiknya 180 derajat. Mendadak ia menjadi “sekutu dekat” bagi Barat. Ia mengadakan “*deal-deal*” politik dengan PM Inggris (waktu itu) Tony Blair. Diberitakan, termasuk di dalamnya penjualan minyak Libya ke Inggris, sumbangan Qadhafi kepada London School of Economics (universitas terkemuka di London) serta pembebasan “pelaku” pengeboman pesawat komersial Pan Am di Lockerbie

(1988), Abdelbaset Ali al-Megrahi, yang ditahan di penjara Skotlandia. Pembebasan Al-Megrahi pada 2009 itu sempat membangkitkan amarah Amerika Serikat. Qadhafi tidak hanya berhasil memperbaiki hubungan dengan Inggris, tetapi juga dengan Italia dan Prancis. Pengakuan Saiful Islam Qadhafi (putra Qadhafi) bahwa ayahnya ikut mendanai kampanye Presiden Prancis Nicolas Sarkozy sempat menimbulkan kehebohan juga. Namun, pergolakan politik di Dunia Arab ditambah ambisi Barat untuk menguasai minyak Libya membuat skenario normalisasi Barat-Libya yang berlangsung sejak 2003 menjadi berantakan.⁶

Jarum jam seakan berputar balik. Di usianya yang sudah hampir 70 tahun, Qadhafi kembali mengibarkan panji perlawanan terhadap Barat. Amerika Serikat dan sekutunya seakan tidak pernah mau belajar dari sejarah. Kegagalan mereka di Irak dan Afghanistan sepertinya belum cukup membuat mereka belajar. Akankah krisis Libya yang melibatkan kekuatan militer Barat berlarut-larut sebagaimana di Irak dan Afghanistan? Akibatnya, rakyat sipil Libya tidak hanya menderita lantaran ditindas pasukan Qadhafi, melainkan juga menjadi korban permainan kotor militer Amerika Serikat dan kawan-kawan. Berbeda dengan Libya, dalam menyikapi krisis politik di Bahrain (juga di Yaman), Barat justru berpihak kepada penguasa. Mereka berkepentingan melindungi dinasti Khalifah di Bahrain dan rezim Presiden Abdullah Saleh di Yaman, agar tidak mengalami nasib serupa dengan Bin Ali dan Mubarak. Barat yang sudah kehilangan sekutu terpenting di Mesir dan Tunisia kemudian menjadikan Raja Bahrain Syekh Hamad bin Isa al-Khalifah dan dinasti Khalifah secara keseluruhan di Bahrain serta rezim Abdullah Saleh di Yaman sebagai pertaruhan terakhir. Pasalnya, jika dinasti Khalifah (juga Saleh) berhasil ditumbangkan oleh sebuah revolusi rakyat, revolusi serupa hampir pasti akan menjalar ke negara-negara lain di kawasan Teluk, termasuk

⁶ Sumber lain menyebutkan bahwa Qadhafi berniat menasionalisasikan perusahaan-perusahaan minyak Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Ini yang melatar-belakangi dukungan Barat/NATO terhadap para pemberontak anti-Qadhafi yang tergabung dalam NTC. Lihat, misalnya, “Three Little Words: WikiLeaks, Libya, Oil,” dalam *dissidentvoice.org/2011/06*.

Yordania. Ironisnya, Qadhafi justru dibunuh oleh NATO dan sekutunya pada Oktober 2011.

Oleh karena itu, Barat dan PBB seakan-akan menutup mata terhadap masuknya ribuan pasukan Kerajaan Arab Saudi ke Bahrain untuk ikut mengatasi gerakan perlawanan rakyat di Bahrain. Padahal, sebagaimana rakyat Libya, rakyat di Bahrain dan Yaman pun menghendaki kebebasan berpolitik. Semestinya Barat tidak berlaku diskriminatif. Tapi itulah faktanya, standar ganda mereka kembali terlihat jelas dalam krisis politik di Libya dan Bahrain serta Suriah dan Yaman. Gelombang gerakan pro-demokrasi (Musim Semi) yang menuntut reformasi politik di Dunia Arab, yang diawali dengan keberhasilan mereka menjatuhkan Presiden Tunisia Zaeen Abidin Bin Ali dan kemudian disusul oleh tergulingnya Presiden Husni Mubarak di Mesir dan kemudian menjalar ke bagian lain di Dunia Arab, terutama Libya, Yaman, Bahrain dan Yordania.

Gelombang tersebut diperkirakan tidak akan berhenti sampai di situ, melainkan akan terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya, termasuk Palestina dan Saudi Arabia, kendati ada kecurigaan intervensi militer NATO sesungguhnya tidak untuk memaksa Pemimpin Libya Kolonel Muammar Qadhafi mundur, melainkan memiliki tujuan politik strategis lebih jauh untuk menghentikan gelombang pro-demokrasi itu sendiri agar tidak menjalar ke negara-negara Arab sekutu Barat. Jatuhnya Bin Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir menandakan “kekalahannya” cukup telak bagi Barat (Amerika Serikat/NATO) sejak jatuhnya Syah Reza Pahlevi di Iran sekitar 40 tahun lalu. Jatuhnya Mubarak sekaligus menandai adanya perubahan strategi politik Barat di Dunia Arab dan Timur Tengah secara keseluruhan. Mubarak adalah “boneka” Amerika yang paling setia, termasuk dalam melindungi eksistensi negara Israel. Mubarak tidak segan-segan untuk menutup rapat-rapat perbatasan Mesir-Gaza agar warga Palestina tidak dapat menghindari dari kekejaman militer Israel. Dengan jatuhnya Mubarak, ditambah belum adanya kepastian siapa yang akan berkuasa di Mesir, dapat semakin membuat posisi rezim Israel kian terjepit.⁷ Namun, bagaimana sebenarnya masa

depan Israel dengan makin derasnya gelombang demokratisasi di Dunia Arab?

Selama bertahun-tahun, Dunia Arab dicitrakan seakan-akan jauh dari politik yang demokratis. Peralihan kekuasaan senantiasa hanya melibatkan “lingkaran dalam” istana, baik kalangan keluarga maupun klik elite politik yang berkuasa. Namun, kondisi ini justru “dipelihara” oleh Barat. Mereka sama sekali tidak peduli pada kenyataan bahwa rezim-rezim itu telah menindas rakyatnya selama berpuluh-puluh tahun. Yang lebih penting bagi Barat adalah rezim-rezim tersebut dapat melayani kepentingan ekonomi dan politik Barat, terutama dalam hal suplai minyak dan melindungi eksistensi negara Israel.

Itulah sebabnya, masalah Palestina tetap dibiarkan terkatung-katung. Apa yang disebut sebagai “proses perdamaian” pada hakekatnya tidak lebih dari sekedar “sandiwara” dengan Amerika Serikat sebagai “sutradaranya” dengan tujuan utama untuk “menghibur” publik di Dunia Arab. Pengaruh kaum *Hawkish* dan *Neo-Conservative* (yang dikendalikan Lobi Israel) dalam politik Amerika Serikat, tampaknya masih cukup kuat, kendati George W. Bush dan Dick Cheney sudah tidak lagi berdiam di Gedung Putih. Presiden Barack Hussein Obama tampak sebagai “pion” (dalam permainan catur) yang tidak mampu berbuat banyak untuk menciptakan situasi yang lebih baik di kawasan Timur Tengah.⁸ Ketidakmampuan Presiden Obama untuk menghentikan ambisi PM Israel Benyamin Netanyahu yang terus membangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina serta retorika Obama yang terus mengancam Iran (terkait dengan kasus program nuklir Teheran), membuktikan asumsi di atas.

Keputusan Obama untuk terlibat langsung dalam Krisis Libya pun, kemungkinan besar

Israel untuk Kairo terpaksa kembali ke Tel Aviv. Demo ini dipicu oleh tewasnya lima polisi Mesir oleh militer Israel di sekitar perbatasan Mesir-Israel.

⁸ Salah satu contoh paling mutakhir adalah penolakan Amerika Serikat terhadap keinginan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Meski didukung oleh banyak negara, tapi keinginan Abbas tersebut diganjal oleh veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Bersama Israel, Amerika Serikat merupakan penolak paling lantang terhadap Palestina. Sikap Amerika Serikat ini berbeda sekali dengan sikap mereka terhadap negara baru seperti Sudan Selatan.

⁷ Pada September 2011, misalnya, berlangsung demonstrasi anti-Israel secara besar-besaran yang mengakibatkan Dubes

akibat tekanan kuat dari kaum *Hawkish* dan *Neocons*. Sulit di pungkiri, intervensi militer Amerika Serikat dan kawan-kawan, meski atas nama “kemanusiaan”, namun pada hakekatnya lebih didorong oleh ambisi menguasai minyak Libya. Kaum *Hawkish* dan *Neocons* (khususnya yang tergabung dalam PNAC/*Project for New American Century*) selalu berdalih, untuk “menguasai dunia maka harus pula menguasai sumber energi minyak bumi.” Akibatnya, Amerika Serikat/NATO hanya “berani” mengintervensi secara militer terhadap Libya, tapi tidak kepada negara-negara Arab lain (kendati sudah banyak warga sipil yang tewas akibat kebrutalan penguasa) seperti Yaman dan Bahrain. Libya merupakan negara kaya minyak dan sekaligus menjadi negara Arab yang dikuasai oleh pemimpin yang sulit dikendalikan oleh Barat, berbeda dengan Yaman dan Bahrain.

Selama berpuluh-puluh tahun, negara Israel selalu dicitrakan sebagai sebuah negara “paling maju” di Timur Tengah. Negara ini dianggap memiliki keunggulan di segala bidang dibanding negara-negara Arab tetangganya yang selalu dicitrakan “terbelakang”. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah. Terutama jika mengacu pada beberapa kali kekalahan Arab dalam perang melawan Israel serta kelihaian kaum Lobi Israel dalam mengendalikan elite politik dan media massa Barat. Namun, mitos keunggulan Israel mendadak mulai runtuh, terutama setelah tiga kejadian penting, yaitu: perang Israel vs Hizbullah Lebanon pada 2006; perang Israel vs Hamas di Jalur Gaza (2008) serta penyerangan atas kapal sipil “Maxi Marmara” dan “Rachel Corie” di perairan Jalur Gaza (2010). Perang Israel vs Hizbullah dan Hamas, membukakan mata dunia bahwa keunggulan militer Israel ternyata hanya tinggal mitos belaka. Sementara kasus “Maxi Marmara” dan “Rachel Corie” berhasil membalikkan sikap mayoritas warga Barat, yang semula bersimpati, berbalik menjadi antipati, pada rezim Israel, yang terbukti tidak segan-segan mengorbankan warga sipil untuk tujuan politiknya. Dalam hal ini sebenarnya Israel layak disejajarkan dengan Al-Qaeda sebagai kaum “teroris” dunia.⁹

⁹ Insiden kapal bantuan “Maxi Marmara” ini telah mengakibatkan putusnya hubungan politik dan militer antara Turki dan Israel, pada September 2011. Padahal selama ini, Turki merupakan sekutu terpenting Israel di kawasan Timur Tengah, di

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pernah menegaskan, Israel layak “dihapuskan” (*wipe off*) dari peta dunia, lantaran eksistensinya dianggap “ilegal”. Israel memang didirikan di atas fondasi kebohongan yang bernama “*holocaust*” yang kabarnya, telah mengakibatkan tewasnya “enam juta” warga Yahudi di tangan Hitler pada masa Perang Dunia. “*Holocaust*” menjelma menjadi “kebenaran mutlak” yang nyaris “menyamai” agama. Di Eropa, misalnya, ada seorang sejarawan yang dijejloskan ke penjara hanya karena dia menyanggah kebenaran ilmiah “*holocaust*”.¹⁰ Sudah tentu, pernyataan Ahmadinejad tersebut menyulut api kemarahan di Barat dan para anteknya. Namun, Ahmadinejad justru memperoleh simpati dari kalangan Rabbi Yahudi “anti-Zionis” yang tergabung dalam kelompok “Neturei Karta” yang berbasis di Washington DC. Sudah lama kelompok Rabbi “ortodoks” ini meyakini bahwa eksistensi negara Zionis-Israel justru bertentangan dengan Kitab Suci mereka, Taurat.¹¹

Jika mayoritas warga Arab mulai dapat menatap masa depan yang lebih cerah akibat gelombang demokratisasi maka tidak demikian halnya dengan warga Israel. Rezim Israel sudah kehilangan hak moral untuk membanggakan diri sebagai negara Timur Tengah yang “paling demokratis”. Israel bahkan diselimuti rasa waswas dengan gelombang demokratisasi di Dunia Arab. Soalnya, cepat atau lambat, gelombang demokratisasi yang tengah melanda Dunia Arab bagaikan “Gelombang Tsunami” yang dapat melanda para sekutu Israel dan para “boneka” Barat di kawasan ini.

Masalah Terorisme

Pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden, dilaporkan tewas dalam sebuah operasi militer yang dilancarkan pasukan elite Amerika Serikat di kota Abbottabad, Pakistan, 2 Mei 2011. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mengumumkan

samping Mesir (di bawah Mubarak) dan Yordania. Di Yordania juga sudah mulai muncul aksi-aksi yang menuntut agar Kedubes Israel di Amman (ibukota Yordania) ditutup saja.

¹⁰ Lihat, misalnya, “Holocaust Didn’t Happen?! Millions not exterminated with louse disinfectant and diesel exhaust?! What is the evidence?!” dalam <http://666ismoney.com/Holocaust.Ads.html>.

¹¹ Lihat, www.nkusa.org.

sendiri secara langsung perihal tewasnya Osama. Berita ini sudah tentu disambut dengan penuh sukacita oleh warga Amerika Serikat dan para simpatisannya sehingga berhasil menaikkan pamor Obama --modal penting untuk maju lagi dalam Pilpres AS 2012-- yang sempat melorot belakangan. Namun, sebaliknya, justru disambut dengan penuh rasa berduka dan sekaligus kemarahan oleh para pendukungnya di berbagai belahan dunia, khususnya di Afghanistan dan Pakistan. Masih banyak tanda tanya di sekitar kematian Osama. Di antaranya, adalah mengapa Osama (mendadak) pindah, dari Afghanistan ke Pakistan? Apakah ini buah dari sebuah pengkhianatan yang dilakukan orang-orang terdekat Osama? Benarkah sewaktu tertembak, Osama sama sekali tidak bersenjata dan tanpa pengawalan yang ketat seperti biasanya? Sejauhmana kebenaran sinyalemen Dr. David Griffin (tokoh agama Kristen asal Amerika Serikat) bahwa Osama sebenarnya sudah meninggal delapan tahun silam akibat sakit ginjal? Dan, masih banyak lagi. Bahkan yang paling ekstrim, tidak mempercayai berita itu sama sekali.

Di era seperti masa kini, rasanya sulit mencari kebenaran yang lain dari yang sudah dilaporkan oleh media-media utama versi Barat. Semua berita yang bersumber dari Barat, sepertinya, sudah harus diterima sebagai suatu "kebenaran". Seakan-akan sudah tidak ada lagi yang mampu meng-*counter* nya. Jika mereka bilang "A" maka manusia seluruh dunia harus meyakini bahwa itu memang "A", kendati, misalnya, yang sebenarnya itu adalah "B". Barangkali, hanya tinggal segelintir manusia yang masih memiliki daya kritis terhadap semua pemberitaan dari Barat. Walhasil, ketika Barat mengatakan bahwa Osama Bin Laden itu seorang "teroris" maka mayoritas manusia di seluruh dunia praktis menyetujuinya, termasuk mereka yang ada di negara-negara Muslim. Padahal, jaringan media Barat, umumnya dikendalikan oleh Lobi Israel, yang terang-terangan memusuhi Islam. Seakan-akan di dunia ini hanya ada seorang "gembong teroris" yang bernama Osama Bin Laden.¹²

¹² Padahal, seperti dikatakan Prof. Dr. Amien Rais di sebuah tv swasta pada Mei 2011, bahwa Osama hanyalah seorang "teroris kecil". Masih ada "teroris besar", yang bernama Amerika Serikat dan Israel.

Akan tetapi, terlepas dari kontroversi di atas, kita asumsikan saja pemberitaan tentang Osama Bin Laden, memang benar adanya. *Toh*, sebuah kematian adalah bagian dari takdir Tuhan yang akan dialami semua umat manusia. Lagi pula, bagi seorang Osama Bin Laden, kematian adalah sebuah "kemenangan" dalam bentuknya yang paling hakiki. Oleh sebab itu, ada seorang penulis Barat yang menganggap tewasnya Osama Bin Laden sebagai sebuah kemenangan yang berhasil diraihnyanya.¹³ Obama, rakyat Amerika Serikat, dan para pendukungnya, boleh saja bergembira seakan telah keluar sebagai "pemenang" dalam perang panjang melawan "terorisme". Padahal, menurut Balko, "pemenang yang sebenarnya adalah Osama Bin Laden". Osama bukan hanya telah berhasil meraih cita-citanya untuk bertemu dengan Sang Pencipta, namun juga telah berhasil membuat kondisi ekonomi Amerika Serikat benar-benar merosot tajam akibat terjatuh dalam perang yang amat panjang di Afghanistan dan Irak. Osama Bin Laden berhasil menjerat rezim Bush dan kemudian Obama untuk masuk dalam perangkap jebakan kubangan darah dan air mata di Afghanistan dan Irak, tanpa disadari oleh Gedung Putih bagaimana mereka dapat keluar dari sana. Pada akhir periode pertama Obama, diperkirakan jumlah serdadu AS yang tewas di kedua negara itu diperkirakan dapat mencapai 6000 orang. Dua kali lipat jumlah warga Amerika Serikat yang tewas akibat Tragedi 11 September 2001.

Osama adalah sebuah sosok yang penuh dengan misteri. Sebuah versi --yang belum tentu benar-- menggambarkan sebagai seorang pejuang di medan perang, kendati ia berasal dari keluarga kaya Saudi Arabia, guna melawan pasukan pendudukan Uni Soviet di Afghanistan pada dekade 1980 an. Oleh karenanya, Amerika Serikat yang waktu itu menjadi musuh utama Soviet, menjalin aliansi dengan para Mujahidin (Pejuang) Afghanistan, termasuk Osama. Setelah pasukan Soviet berhasil diusir dari Afghanistan, Osama dan kelompoknya, Al-Qaeda, justru berbalik melawan Amerika Serikat karena perilaku negara "*superpower*" ini yang dianggap memusuhi negara-negara Muslim. Di sisi lain, Amerika

¹³ Lihat, misalnya, Radley Balko, "Osama Won", dalam <http://reason.com/blog>, 02 Mei 2011.

Serikat seakan-akan justru merasa menemukan “musuh baru” dalam sosok Osama dan Al-Qaeda nya, setelah runtuhnya Komunisme Uni Soviet. Namun, Amerika Serikat justru menganggap Osama dan Al-Qaeda sebagai “representasi” dari umat Islam pada umumnya sehingga cenderung menyamakan perangnya melawan Al-Qaeda sebagai perang melawan Islam, terutama setelah Al-Qaeda dituduh berada di belakang serangan terhadap WTC dan Pentagon dalam Tragedi 11 September 2001. Kendati para petinggi Amerika Serikat (termasuk Presidennya) berulang kali mengatakan bahwa perang melawan Al-Qaeda, “bukan sebagai perang melawan Dunia Islam,” namun dalam prakteknya di lapangan justru sangat jelas terasakan sikap permusuhan (elite politik dan media massa) Amerika Serikat terhadap Islam.

Sikap permusuhan Amerika Serikat terhadap Dunia Islam, tidak hanya terlihat dari invasi militernya terhadap Irak dan Afghanistan, namun juga dirasakan oleh kaum Muslim warga Amerika Serikat sendiri yang merasa diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini semakin diperparah oleh fakta makin kuatnya cengkeraman kaum Lobi Israel dalam politik Amerika Serikat, utamanya sejak era George W. Bush hingga Obama.¹⁴ Akibatnya, Amerika Serikat tidak hanya menjadi musuh bagi Osama dan Al-Qaeda, namun “dimusuhi” oleh mayoritas warga di Dunia Islam. Apalagi, Amerika Serikat tidak hanya berhenti sampai Afghanistan dan Irak. Amerika Serikat pun kemudian ikut ambil bagian secara aktif dalam mengobrak-abrik negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya seperti Libya. Tidak bisa dipungkiri, Amerika Serikat pun tengah berusaha menggoyang pemerintahan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (dan Presiden Suriah Bashar al-Asad). Padahal, Iran (maupun Suriah) bukanlah ancaman bagi AS. Iran juga bukan merupakan sekutu Al-Qaeda. Permusuhan Amerika Serikat terhadap Iran dan Dunia Islam pada umumnya, lebih disebabkan karena kuatnya pengaruh Lobi Israel terhadap Gedung Putih.

Lalu, apakah meninggalnya Osama dapat berdampak positif bagi kawasan Timur Tengah?

Apakah kawasan ini akan menjadi lebih damai tanpa Osama? Jika kita melihat pada konflik di kawasan ini maka jelas sumbernya bukan terletak pada Osama dan Al-Qaeda. Keberadaan Al-Qaeda lebih merupakan reaksi atau respons terhadap ketidak-adilan di kawasan ini. Ketidak-adilan tersebut justru bersumber pada penjajahan Tanah Palestina oleh rezim Israel dan pendudukan militer Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Selama hak-hak sah bangsa dan rakyat Palestina, Afghanistan, dan Irak, masih belum dipulihkan, kematian seorang Osama Bin Laden tidak akan berdampak secara signifikan di Timur Tengah.

Tewasnya Osama di Pakistan mestinya merupakan sebuah penutup dari aksi perburuan panjang dalam perang Amerika Serikat melawan jaringan al-Qaida. Namun, kematian Osama justru memunculkan makin banyak pertanyaan. Termasuk yang patut dipertanyakan adalah dasar hukum membunuh Osama. apakah legal menembaknya di Pakistan terutama karena saat ditangkap dia tidak bersenjata? Pelapor khusus PBB untuk kasus kejahatan pembunuhan, Christof Heyns, menyampaikan pertanyaan itu kepada BBC. “Apa benar perlu mengeksekusinya di tempat? Persoalannya adalah: dasar hukum resmi, pelintasan perbatasan, masuk ke sebuah negara berdaulat, padahal perintahnya saat itu jelas – di tempat kalau ada pilihan mestinya tangkap daripada tembak,” kata Heyns.¹⁵

Hampir semua media massa Barat baik cetak maupun tv, kecuali media *on-line* yang “melawan arus” umumnya “satu suara” dalam menjuluki Osama Bin Laden sebagai “Gembong Teroris Internasional”. Padahal hingga saat ini, PBB-pun bahkan belum berhasil menemukan definisi yang universal dari istilah “terorisme”. Jika “terorisme” semata dipahami sebagai aksi politik yang mengorbankan warga sipil maka Osama memang masuk kategori “teroris”, namun jelas bukan “gembong”nya. Rezim Israel yang secara sistematis dan terus-menerus membantai warga sipil Palestina, sangat layak mendapat julukan sebagai “Gembong Teroris Internasional”. Begitu pula, mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang bertanggung jawab atas invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan

¹⁴ Lihat, misalnya, John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt. *The Israel Lobby and US Foreign Policy*. (London: Penguin Books, 2007).

¹⁵ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110509_osamadeath.shtml

(2001) dan Irak (2002) lebih layak mendapat julukan serupa, sebagai “Gembong Teroris Internasional”.

Namun, dua pakar politik internasional asal Amerika Serikat, John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt,¹⁶ bahkan menyebutkan bahwa pengelompokan “terorisme” itu sendiri sudah merupakan kesalahan yang fatal. Sebab, “*Terrorism is a tactic and not a unified movement ...*” (“Terorisme merupakan sebuah taktik, bukannya sebuah gerakan tunggal”).

Amerika Serikat, khususnya mantan Presiden George W. Bush dan para tokoh Neo-Konservatif, menuding Osama dan kelompoknya Al-Qaeda sebagai dalang runtuhnya menara kembar WTC di New York pada 11 September 2011. Kendati secara ilmiah belum berhasil dibuktikan, namun opini yang terus-menerus dipompakan ke publik berhasil menjadi “bukti” keterlibatan Osama dan Al-Qaeda dalam Tragedi 911. Ini kemudian menjadi alat pembenaran bagi invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak, sekalipun banyak pihak (khususnya kaum intelektual yang berpikiran kritis, seperti Noam Chomsky dan kawan-kawan menyatakan) bahwa invasi militer tersebut sama sekali tidak terkait dengan soal “terorisme”. Tewasnya Osama Bin Laden seoyangnyanya dapat membukakan mata dunia bahwa invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan (juga Irak dan Libya) sama sekali tidak terkait dengan masalah “terorisme”. Buktinya, kendati Osama/Al-Qaeda sudah berhasil dilumpuhkan oleh Amerika Serikat, namun dalam kenyataannya Amerika Serikat belum juga berniat keluar dari Afghanistan dan Irak. Berbagai dalih yang digunakan Amerika Serikat untuk tetap berada di Afghanistan dan Irak, hanya menegaskan bahwa ada agenda lain mereka (di luar masalah terorisme) di kedua negara Muslim tersebut.

Melihat adanya kesinambungan kebijakan Amerika Serikat terhadap Dunia Islam, dari era George W. Bush hingga Barack Obama sekarang maka hampir bisa dipastikan tidak adanya perubahan yang signifikan dari kebijakan Amerika Serikat sepeninggal Osama Bin Laden. Kebijakan Amerika Serikat di Dunia Islam, khususnya terhadap negara-negara Arab, Afghanistan dan

Iran, tampaknya tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya Osama Bin Laden, melainkan oleh para penguasa di Tel Aviv (Israel). Setidaknya itu pula yang dilihat oleh John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt.¹⁷

Kebijakan Amerika Serikat di Dunia Islam, sejak era Bush sampai Obama, cenderung hanya mengikuti kepentingan Israel. Contohnya, ketika rezim Israel terus membangun pemukiman Yahudi di tanah Palestina, Obama sama sekali tak berdaya. Padahal jelas bahwa itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Obama, apalagi menteri luar negerinya, Hillary Clinton, hanya mengikuti apa yang dilakukan rezim Israel. Begitulah yang terlihat dalam kasus penyerangan militer Israel terhadap kapal sipil *Maxi Marmara* (2010) maupun sikap mereka terhadap rekonsiliasi Hamas-Fatah (2011). Karena pemerintahan Israel “marah” pada rekonsiliasi Hamas-Fatah, Amerika Serikat-pun ikut-ikutan “marah”.

Sikap Amerika Serikat terhadap Iran-pun, ditentukan oleh bagaimana cara pandang Israel. Kendati Amerika Serikat dan Iran sama-sama “bermusuhan” terhadap Al-Qaeda, namun karena Teheran juga bermusuhan dengan rezim Israel (beberapa kali Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, misalnya, menyebut Israel akan “lenyap” dari muka bumi) maka Amerika Serikat-pun tetap memandang Iran sebagai musuh utama. Jadi, meninggalnya Osama Bin Laden, tampaknya tidak berdampak positif bagi hubungan Amerika Serikat dengan Dunia Islam, kecuali jika Amerika Serikat segera mengakhiri penjajahannya di Afghanistan dan Irak serta mendukung sepenuhnya proklamasi Negara Palestina Merdeka.

Isu Palestina

Presiden AS Barack Obama tampaknya cukup cerdik memainkan kartunya di Timur Tengah. Setelah ia memerintahkan pembunuhan atas diri Pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden, yang tentu saja menimbulkan kritikan tajam dan sikap antipati mayoritas warga di Dunia Islam, Obama melontarkan visinya tentang “perdamaian” Timur Tengah, yang tergolong “berani”. Berbeda dengan para Presiden AS sebelumnya yang selalu “takut” untuk berbeda

¹⁶ John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*, (London: Penguin Books, 2007).

¹⁷ *Ibid.*

pendapat dengan Israel, Obama justru secara terang-terangan “berani” berbeda pendapat dengan rezim Israel itu. Menurut Obama dalam sebuah pidato yang ia sampaikan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat, 19 Mei 2011, perdamaian Palestina-Israel dapat terwujud jika Israel menarik pasukannya ke perbatasan sebelum Perang 1967, yang antara lain menyebabkan didudukinya wilayah-wilayah Tepi Barat Sungai Yordan, Jalur Gaza, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan. Di sisi lain, menurut Obama, Israel-pun mempunyai hak atas keamanan mereka. Visi Obama mendapat sambutan positif dari hampir seluruh pemimpin dunia. Eropa, Rusia, PBB, Dunia Arab, semuanya menyambut gembira. Namun, seperti yang sudah diperkirakan, visi Obama itu justru ditolak mentah-mentah oleh Israel. PM Israel, Benyamin Netanyahu, langsung terbang ke Washington guna menyampaikan kemurkaan bangsa Israel kepada Obama. Kelompok-kelompok Yahudi pro-Israel di AS-pun, menunjukkan kemarahan mereka. Bahkan mereka bertekad tidak akan lagi memilih Obama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat 2012 mendatang serta berjanji tidak akan memberikan dukungan finansial lagi bagi kampanye Presiden Amerika Serikat tersebut. Dalam Pilpres Amerika Serikat 2008, para pemilih Yahudi Amerika Serikat dilaporkan sangat berjasa dalam memenangkan Obama.

Seperti sudah diduga pula, Obama segera berusaha menenangkan Israel. Obama mengatakan pandangannya “beberapa kali disalahartikan”. Berbicara dengan kelompok Lobi Israel di Amerika Serikat, AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*), Obama mengatakan bentuk perbatasan seharusnya dibicarakan antara Israel dan Palestina. “*In America, the power of the Israel lobby is much greater than at any time in the past, and certainly since the 1967 war*,” demikian, antara lain, tulis Kolomnis Justin Raimondo.¹⁸ Netanyahu menyatakan kemarahan terhadap komentar Obama itu. Ia mengatakan perbatasan (1967) tersebut tidak dapat dipertahankan.

Salah satu dampak positif dari pergolakan di Dunia Arab adalah bersatunya kembali dua faksi besar di Palestina, yaitu Hamas dan Fatah. Perjanjian Rekonsiliasi itu ditanda-tangani oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas selaku Pemimpin Gerakan al-Fatah dan Pemimpin Hamas Khalid Meshal, di Kairo (Mesir), 4 Mei 2011. Rekonsiliasi ini disambut dengan positif oleh hampir seluruh warga dunia, kecuali oleh Israel dan Amerika Serikat.

Hamas (*Harakat al-Muqawwamah al-Islamiyyah*) atau Gerakan Perlawanan Islam adalah faksi “Islamis” di kalangan para pejuang Palestina yang merasa tidak puas dengan ideologi “nasionalisme-sekuler” yang dianut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di bawah kepemimpinan Yasser Arafat. Gerakan Hamas secara resmi diproklamkan pada 1987 bersamaan dengan meletusnya gerakan Intifada I. Gerakan ini semula dibentuk Syaikh Ahmad Yassin, Mahmoud al-Zahar, dan tokoh-tokoh Muslim Palestina lainnya yang semula bernaung di bawah Ikhwanul Muslimin. Yassin sempat memimpin Hamas sampai ia terbunuh pada 22 Maret 2004. Ia dibunuh oleh para serdadu Israel. Setelah Yassin meninggal, tampil Dr. Abdul Aziz al-Rantissi sebagai pemimpin baru Hamas. Namun, Dr. Rantissi tidak sampai sebulan memimpin Hamas. Pada 17 April 2004, Israel kembali membunuh pemimpin Hamas. Tampaknya belajar dari tragedi yang menimpa Syaikh Yassin dan Dr. Rantissi, Hamas tidak mau lagi mengumumkan secara resmi siapa yang menjadi pemimpin mereka dewasa ini. Namun, bisa jadi, Hamas pasca-Yassin dan Rantissi, dikendalikan oleh Khalid Meshal dan Ismail Haniya yang menjadi PM Palestina di Jalur Gaza.

Dalam lima tahun terakhir, sebagai kekuatan politik-militer, Hamas sangat diperhitungkan oleh-oleh lawan mereka, terutama Israel, Amerika Serikat dan para sekutu mereka. Pada pemilu 2006 di Palestina, Hamas berhasil meraih suara mayoritas mutlak. Ironisnya, hasil pemilu yang benar-benar demokratis ini, sama sekali tidak diakui oleh Amerika Serikat dan para sekutu Israel. Dengan berbagai macam cara, mereka berusaha menumbangkan pemerintahan Hamas yang *legitimate*. Lalu, digunakanlah taktik kaum kolonial, yaitu *divide et impera*. Dengan

¹⁸ “*The Lobby Takes the Offensive*,” dalam *www.antiwar.com*, 23 Mei 2011.

berbagai iming-iming yang disertai ancaman, Gerakan al-Fatah Palestina, yang memang berhaluan sekuler dan pro-Barat, berhasil diprovokasi untuk memerangi Hamas. Walhasil, pada 2007, Hamas-pun terusir dari wilayah Tepi Barat. Namun, di Jalur Gaza justru Fatah yang terusir. Keberhasilan Hamas mempertahankan dominasinya di Gaza, justru membuat Israel geram. Maka, Hamas yang sudah terkepung dari segala penjuru di Gaza --yang sudah menjelma bagaikan penjara raksasa-- pada 2008 pun kemudian harus menghadapi serangan bombardir yang berulang-kali dari kekuatan militer Israel yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam kenyataannya, aksi militer Israel tersebut justru gagal mengalahkan kekuatan Hamas. Sebaliknya, Hamas justru berhasil mendapatkan simpati dari warga dunia pada umumnya. Tidak hanya dari para warga di Dunia Arab dan Islam saja. Di London, misalnya, pada Januari 2009 berlangsung unjuk rasa besar-besaran yang diikuti pula oleh sejumlah aktivis dan artis warga Inggris asli yang mengutuk serangan militer Israel di Gaza.¹⁹

Berbeda dengan Hamas, yang secara tegas mengibarkan panji-panji Islam sebagai landasan utama perjuangan mereka melawan Imperialisme/Zionisme, Gerakan al-Fatah yang mendukung pemerintahan Otoritas Palestina di wilayah Tepi Barat di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas, justru berhaluan sekuler dan karenanya mendapat dukungan dari Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Palestina di bawah Abbas berusaha menjalin perdamaian dengan Israel, namun rupanya proses perdamaian yang disponsori Amerika Serikat hanya berhenti sampai “proses” saja, sementara “perdamaian” yang dinantikan tidak pernah menpai hasil yang nyata. Berkali-kali perundingan Palestina-Israel tidak pernah membawa hasil apa pun. Penyebabnya tidak lain kegagalan Amerika Serikat sebagai “penengah” yang ternyata tidak mampu berbuat adil. Ibarat dalam pertandingan sepak bola, sebagai wasit Amerika Serikat ternyata bersikap berat sebelah. Keberpihakan Amerika Serikat pada Israel terlalu terang-terangan. Semula,

terpilihnya Barack Obama diharapkan dapat mengubah sikap Amerika Serikat untuk bersikap lebih adil di Timur Tengah. Ternyata Obama sama dengan pendahulunya, George W. Bush. Apalagi, Obama mengangkat Hillary Clinton yang sangat pro-Israel sebagai Menlu Amerika Serikat. Buktinya, ketika PM Israel Benyamin Netanyahu memperluas pembangunan pemukiman Yahudi, yang oleh banyak kalangan dinilai dapat menghambat perdamaian, Obama ternyata tak mampu berbuat banyak. Padahal, semula ia juga menentang kebijakan Netanyahu itu.

Pergolakan di Dunia Arab (Musim Semi Arab), seakan menyadarkan bangsa Palestina bahwa nasib masa depan mereka tidak tergantung pada Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya. Maka, di tengah meningkatnya intensitas unjuk rasa jutaan warga di berbagai negara Arab, warga Palestina (di Gaza dan Tepi Barat) pun ikut turun ke jalan. Namun, mereka bukan hendak menjatuhkan pemerintahannya, melainkan mendesak segera diakhirinya perpecahan intern di antara mereka, khususnya antara Hamas dan Fatah. Para pemimpin Hamas dan Fatah pun kemudian menyadari, berlarut-larutnya konflik di antara mereka hanya akan menguntungkan pihak musuh. Maka, seiring dengan kejatuhan Presiden Husni Mubarak --yang selalu memusuhi Hamas-- Mesir-pun kemudian memainkan peranan yang lebih pro-aktif guna merujuk Hamas dan Fatah. Sebagaimana euforia warga Arab di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan rezim-rezim otoriter di negara mereka, puluhan ribu warga Palestina pun larut dalam euforia karena tercapainya rujuk Hamas dan Fatah. Berbicara dalam upacara penandatanganan kesepakatan perdamaian itu di Kairo, Ketua Fatah yang juga Presiden Mahmoud Abbas mengatakan, “rakyat Palestina sudah meninggalkan perpecahan.” Sedangkan pemimpin Hamas, Khalid Meshal mengatakan tujuan mereka adalah untuk “membentuk negara Palestina yang berdaulat di Tepi Barat dan di Jalur Gaza tanpa kehilangan satu jengkal pun tanah kepada Israel.” Mahmoud Abbas dan Khalid Meshal belum pernah bertemu sejak Fatah diusir dari Gaza pada 2007, menyusul kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilu 2006.

¹⁹ Penulis sempat menyaksikan secara langsung demonstrasi tersebut.

Rekonsiliasi Fatah-Hamas serta pergolakan rakyat di Dunia Arab, dapat menjadikan Israel sebagai bukan lagi kekuatan yang menentukan di kawasan Timur Tengah. Seperti sudah diduga, Israel menggunakan bahasa-bahasa ancaman, intimidasi dan ultimatum guna merespon pulihnya hubungan Fatah-Hamas. Sementara sekutu utama Israel, Amerika Serikat menunjukkan respons yang biasa-biasa saja, bingung dan merasa asing serta cenderung mengikuti Israel. Rekonsiliasi Hamas-Fatah membuka jalan bagi proklamasi Negara Palestina Merdeka yang dijadwalkan berlangsung pada September 2011. Sejumlah negara termasuk negara-negara Eropa Barat seperti Inggris dan Prancis sudah bersiap-siap untuk mengakui Negara Palestina Merdeka. Tidak mengherankan, jika Netanyahu bersemangat melobi Eropa agar tidak mengakui Negara Palestina. Amerika Serikat-pun diperkirakan mengambil sikap yang tidak jauh berbeda dengan Israel. Namun, yang lebih penting bagi Bangsa Palestina, hendaknya mereka tidak lagi terjebak dalam pertikaian internal seperti empat tahun sebelumnya. Namun, hingga November 2011, deklarasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan. Pada akhir Oktober 2011, Palestina justru berhasil diterima keanggotaannya di badan PBB, UNESCO, dengan mengantongi 107 suara setuju, 14 menolak dan 52 abstain. Keputusan UNESCO untuk menerima keanggotaan penuh Palestina, harus dibayar mahal oleh badan dunia itu karena Amerika Serikat, Israel, dan para sekutunya segera menghentikan bantuan mereka ke UNESCO.

Kekuatan Lobi Israel di Amerika Serikat memang luar biasa. Namun, kekuatan Lobi Israel itu baru sebatas "mitos". Setidaknya sampai tahun 2007, pada saat di mana terbit sebuah buku yang merupakan hasil riset akademis dari dua orang profesor ilmu politik terkemuka dengan kredibilitas yang tak perlu diragukan lagi dari AS yaitu Prof. John J. Mearsheimer (Universitas Chicago) dan Prof. Stephen M. Walt (Universitas Harvard), melalui buku mereka yang kemudian menjadi "*Best Seller*".²⁰ Melalui karya ini, mereka berdua berhasil membuktikan secara ilmiah/akademis bahwa kekuatan lobi

Israel di AS bukan mitos belaka, melainkan sebuah realitas. Dalam menjalankan operasinya, lobi Israel tak segan-segan untuk mengorbankan kepentingan nasional AS dan (bahkan) negara Israel sendiri. Memang, belakangan di AS sudah berdiri kelompok-kelompok Yahudi yang justru anti-Zionisme, seperti Kelompok Neturei Karta yang berbasis di Washington DC. Kelompok Rabbi ortodoks ini meyakini bahwa eksistensi negara Israel justru bertentangan dengan Kitab Suci mereka, Taurat.²¹ Atau, kelompok Lobi Yahudi AS yang lebih "moderat" seperti *J-Street* yang berpandangan bahwa AS selayaknya tak mendukung rezim Israel secara membabi-but. Namun, suara-suara mereka tenggelam lantaran tak didukung media-media utama di AS semisal Fox News ataupun CNN.

Semula warga dunia sepertinya terkejut, ketika Obama menyampaikan visinya tentang solusi Israel-Palestina bahwa keduanya harus kembali ke perbatasan sebelum Perang 1967 dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Rusia, Eropa, Dunia Arab dan PBB sudah menegaskan dukungan mereka. Benarkah Obama begitu berani bersikap berbeda secara frontal dengan Israel? Apakah pengaruh Lobi Israel di Amerika Serikat sudah mulai melemah? Ternyata tidak. Hanya dalam hitungan jam, PM Israel Benyamin Netanyahu langsung terbang ke Washington dan berhasil membuat Obama meralat pernyataannya sendiri. Begitu "*powerful*"nya Netanyahu sehingga seorang seperti Obama dibuatnya langsung tunduk. Dengan berbagai dalih, Obama terpaksa harus menarik kembali visinya tentang perbatasan Palestina-Israel 1967. Barangkali tidak ada satupun pemimpin negara di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk membuat "takut" seorang Presiden AS, seperti yang dilakukan Netanyahu terhadap Obama. Ini sekali lagi membuktikan bahwa yang layak menyandang julukan sebagai negara adikuasa dunia bukanlah AS melainkan Israel. "*Obama was lectured like some schoolboy in the Oval Office in front of the national press and a worldwide TV audience,*" tulis Patrick J. Buchanan.²²

²¹ lihat, www.nkusa.org.

²² Patrick J. Buchanan, "*Bibi's Votes Republican*," dalam www.antiwar.com, 24 Mei 2011.

²⁰ *Ibid.* Buku ini sudah diterjemahkan pada 2010 oleh Penerbit Gramedia Jakarta dengan judul, *Dahsyatnya Lobi Israel*.

Netanyahu memang sudah menyatakan kesediaannya untuk kembali berunding dengan pihak Palestina, kendati terus mendesak agar Presiden Mahmoud Abbas membatalkan rekonsiliasinya dengan para pejuang Hamas serta menolak desakan komunitas internasional agar menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi secara ilegal di wilayah pendudukan. Netanyahu selalu menyebut Hamas sebagai “Al-Qaeda versi Palestina”. Tampaknya ia tidak menyadari, negara Israel juga didirikan melalui cara-cara “teror”, seperti ditulis Mearsheimer dan Walt, bahwa “Kaum Zionis pernah menggunakan terorisme ketika mereka mencoba mengusir Inggris dari Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri, misalnya dengan meledakkan King David Hotel di Yerusalem pada 1946 dan membunuh mediator PBB Folke Bernadotte pada 1948”.²³

Sikap Indonesia

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang memiliki hubungan sangat akrab, baik dengan pihak Barat maupun dengan pihak Arab. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia umumnya sangat berharap agar pemerintah mengambil sikap yang tegas agar tragedi kemanusiaan yang terjadi di beberapa negara Arab, khususnya Libya tidak sampai berlarut-larut sebagaimana di Irak dan Afghanistan. Jika beberapa tahun silam Indonesia pernah bersikap tegas dalam mendukung Resolusi PBB (yang dimotori Amerika) yang menentang program nuklir Iran, tampaknya kini saatnya Pemerintahan RI dituntut untuk bersikap sama tegasnya untuk menentang setiap bentuk intervensi militer. Ketidaktegasan sikap Jakarta hanya memperkuat “rumor” bahwa Indonesia memang “takut” pada Amerika Serikat. Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan yang ada, semisal OKI dan GNB, guna menegaskan sikapnya. Sikap diam dapat ditafsirkan Indonesia “mendukung” intervensi militer asing di Libya. Indonesia harus berani mengambil sikap tegas karena konsitusi RI menolak segala bentuk penjajahan. Selain itu,

berlarut-larutnya krisis di Libya dapat berdampak negatif bagi kepentingan nasional Indonesia.

Qadhafi yang sudah 40 tahun lebih berkuasa di negaranya, memang telah bertindak brutal dan barbarian terhadap rakyatnya sendiri, namun kekejaman Qadhafi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekejaman Israel terhadap rakyat sipil Palestina, atau kekejaman Washington dan sekutunya terhadap warga sipil di Afghanistan dan Irak. Kekejaman Qadhafi memang harus dihentikan. Tapi pada saat yang sama juga harus dihentikan pula kekejaman Israel dan Amerika Serikat. Dunia semestinya harus bersikap adil. Tidak tebang pilih. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih proaktif dan tidak sekedar menjadi penonton pasif. Qadhafi dibunuh oleh NATO dan sekutunya pada Oktober 2011.

Sebagaimana sikap Indonesia yang cenderung pasif terhadap “Musim Semi” Arab, khususnya intervensi militer Barat (NATO) dalam krisis politik di Libya, Indonesia juga tidak bersikap sama sekali terhadap pembunuhan Osama Bin Laden. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agaknya merasa khawatir terhadap para pendukung dan simpatisan Osama Bin Laden di dalam negeri, jika RI bersikap mendukung aksi Amerika Serikat tersebut. Sebaliknya, Presiden Yudhoyono merasa khawatir terhadap Barat, jika menunjukkan simpatinya terhadap Osama Bin Laden. Namun, berbeda dengan sikap terhadap Musim Semi Arab dan pembunuhan Osama Bin Laden, Indonesia justru berani bersikap lebih tegas untuk berbeda pendapat dengan Amerika Serikat dalam menyikapi rekonsiliasi Hamas dan Fatah di Palestina, di mana Indonesia secara tegas mendukung rekonsiliasi tersebut.²⁴

Daftar Pustaka

- Balko, Radley. “Osama Won”, dalam <http://reason.com/blog>, 2 Mei 2011.
- Buchanan, Patrick J. ““Bibi” Votes Republican,” dalam www.antiwar.com, 24 Mei 2011. dissidentvoice.org/2011/06.
- Mearsheimer, John J dan Stephen M. Walt. 2007. *The Israel Lobby and US Foreign Policy*. London: Penguin Books.

²³ Mearsheimer, John J. dan Stephen M. Walt, *The Israel Lobby and US Foreign Policy*, London: Penguin Books, 2007), hlm. 98.

²⁴ “Indonesia Dukung Rekonsiliasi Fatah-Hamas”, dalam <http://dunia.vivanews.com/news/read/218160-indonesia-dukung-rekonsiliasi-fatah-hamas>.

Sihbudi, Riza. 1996. *Biografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan.

Stiglitz, Joseph E. dan Linda J. Bilmes. 2008. *The Three Trillion Dollar War: The True Cost of Iraq Conflict*.

Vali Nasr. 2007. *Kebangkitan Syiah: Islam, Konflik dan Masa Depan*, (terj). Jakarta: Diwan

www.nkusa.org, diunduh 24 Juni 2011.

<http://dunia.vivanews.com>, diunduh 24 Juni 2011.

<http://oxforddictionaries.com/definition/hawkish>, diunduh 12 Juni 2011.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110509_unosamadeath.shtml, diunduh 24 Mei 2011.

"The Lobby Takes the Offensive," dalam www.antiwar.com, 23 Mei 2011.

"Coalition Military Fatalities by Year", dalam <http://icasualties.org/oef/> diunduh 25 Mei 2011.

"Holocaust Didn't Happen?! Millions *not* exterminated with louse disinfestant and diesel exhaust?! What is the evidence?!", dalam <http://666ismoney.com/HolocaustAds.html>, diunduh 26 Mei 2011.